

## PERAN NOTARIS PASAR MODAL DALAM PROSES PELAKSANAAN *GO PRIVATE* SEBUAH PERSEROAN TERBATAS

WILLIANA HALIM

### *ABSTRACT*

*Go public is one of the choices to the companies that will need additional capital to run and develop their business activities. However, when the benefit of going public is no longer effective to the companies, they will prefer to go private, which is an action of open limited liability companies to switch their status by eliminating their stock notes in the stock exchange. As one of the capital market supporting professional, a notary also takes part in either the implementation of go public or go private. The capital market notary should possess the knowledge of capital market and has registered himself/herself to the Financial Service Authority. Notary plays a role in the articles of association of each capital market person and the making of important deeds such as agreements of investment fund, emission guaranty, and trustee. Notary is also responsible for the deeds, either civilly, criminally, or administratively.*

**Keywords:** *Go Private, Notary Operating in Capital Market, Limited Liability Companies.*

### **I. Pendahuluan**

Perusahaan dalam rangka melangsungkan dan mengembangkan kegiatan usahanya memerlukan sejumlah modal. Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Pertama, melalui pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan.<sup>1</sup> Kedua, pendanaan yang berasal dari luar perusahaan, antara lain dapat berasal dari kreditor berupa utang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun permodalan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham.<sup>2</sup> Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan melalui lembaga pasar modal dengan cara menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau dikenal dengan istilah *go public*.<sup>3</sup>

Dalam proses *go public*, perusahaan melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*), yaitu kegiatan penawaran efek untuk menjual efek

---

<sup>1</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 39-40.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.40.

kepada masyarakat. Setelah proses penawaran umum selesai dilakukan, maka apabila perusahaan menghendaki dan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat mencatatkan sahamnya di daftar efek yang tercatat di bursa (*listing*). Salah satu keuntungan perusahaan yang *listing* adalah saham perusahaan tersebut dapat diperdagangkan di bursa efek.

Namun, bisa dilihat bahwa akhir-akhir ini banyak perusahaan yang telah *go public*, akhirnya melakukan *go private*. Tindakan *go private* merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan *go public*. Pada tindakan *go public*, suatu perseroan menjual sahamnya kepada publik sehingga menjadi perseroan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan *go private* perseroan terbuka berubah statusnya menjadi perseroan tertutup.<sup>4</sup>

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perusahaan yang telah *go public* menjadi *go private*. Pertama, menjadi perusahaan terbuka tidaklah mudah karena harus menjalankan seluruh ketentuan Bapepam-LK (OJK) dan Bursa Efek Indonesia. Kedua, selain itu juga banyaknya laporan-laporan yang harus dipenuhi oleh emiten atau perusahaan publik, khususnya laporan keuangan, yaitu empat kali dalam setahun, termasuk harus melakukan keterbukaan informasi setiap peristiwa yang material kepada publik dalam jangka dua hari kerja. Untuk itu, maka keinginan emiten atau perusahaan publik untuk kembali menjadi perusahaan tertutup (*go private*) adalah sebagai salah satu strategi emiten atau perusahaan publik mencari jalan keluar terhadap kedua masalah tersebut.<sup>5</sup>

Alasan lain suatu perseroan terbuka melakukan *go private* adalah karena merasa terbebani oleh biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai perseroan terbuka. Selain itu, kegiatan *buy back* secara berlebihan dan terjadinya akuisisi juga menjadi alasan terjadinya *go private*.

Di Indonesia, *go private* pertama kali dilakukan pada tahun 1996, yaitu pada tindakan *go private* PT Praxair Indonesia, Tbk. Setelah PT Praxair Indonesia, Tbk, beberapa perusahaan terbuka lain yang melakukan *go private*

---

<sup>4</sup> Men Wih Widiatno, Purnomo Santoso dan Ardi Jaya Pradipta, "Go Private", Makalah, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 2.

<sup>5</sup> Agus Riyanto, "Go Private di Pasar Modal Indonesia", <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/01/go-private-di-pasar-modal-indonesia/>, diakses 14 April 2016.

antara lain adalah PT Pfizer Indonesia, Tbk. (2002), PT Miwon Indonesia, Tbk. (2002), PT Indocopper Investama Tbk. (2002), PT Bayer Indonesia, Tbk. (2003), PT Central Proteinaprima, Tbk. (2004), PT Surya Hidup Satwa, Tbk. (2004), PT Indosiar Visual Mandiri, Tbk. (2004), PT Multi Agro Persada, Tbk. (2005), dan PT Komatsu Indonesia, Tbk. (2005).<sup>6</sup>

Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di pasar modal membutuhkan jasa profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal adalah lembaga/perusahaan yang diperlukan untuk dijadikan sebagai mitra emiten dalam rangka mengadakan penawaran umum.<sup>7</sup> Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan ada beberapa profesi penunjang pasar modal, yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk menjadi profesi penunjang pasar modal, lembaga/perusahaan ini harus telah tercatat dan terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang sekarang diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat dengan OJK.

Untuk dapat menjalankan tugasnya di pasar modal, notaris haruslah memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pasar modal. Oleh karenanya, notaris tersebut harus mengikuti pelatihan yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Selanjutnya notaris harus mendaftarkan dirinya pada Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) sebagai pelaksana tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan VIII.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peran notaris pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwaliamanatan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Riyanto, *Loc. Cit.*

<sup>7</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hal. 59.

<sup>8</sup> M. Irsan Nasarudin, *et.al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.94.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum *go private* dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia?
2. Bagaimana peran notaris pasar modal dalam suatu aksi korporasi berupa *go private*?
3. Bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pasar modal terhadap akta-akta yang dibuatnya dalam rangka aksi korporasi berupa *go private*?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. untuk mengetahui pengaturan *go private* dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia;
2. untuk mengetahui peran notaris pasar modal dalam suatu aksi *go private* yang dilakukan sebuah perseroan terbatas;
3. untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris pasar modal terhadap akta-akta yang dibuatnya dalam rangka aksi korporasi berupa *go private*.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- 4) Keputusan Kepala Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 lampiran Nomor VIII.D.1. tanggal 17 Januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
  - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal;
  - 6) Ketentuan I.12 Peraturan Nomor I-N tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.
  - 7) Kode Etik Notaris, hasil Kongres di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 dan Perubahan Kode Etik Notaris, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
  - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan wawancara dengan notaris pasar modal.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Walaupun *Go Private* telah beberapa kali dilakukan oleh perseroan-perseroan di Indonesia, namun sampai sekarang belum ada peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang khusus mengatur mengenai *Go Private*. Berbeda halnya dengan Pasar Modal di Amerika Serikat. Badan Pengawas Pasar Modal Amerika telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai *Going Private* yaitu Peraturan SEC nomor 13e-3.

Di Indonesia, dapat ditemukan adanya berbagai dasar hukum yang menjadi acuan atau kerangka dalam melaksanakan *go private* itu sendiri. Secara umum dasar hukum dan peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

2. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan lampirannya Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
3. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-263/BL/2011 tentang Penawaran Tender Sukarela tertanggal 31 Mei 2011 dengan lampirannya Peraturan Nomor IX.F.1 Tentang Penawaran Tender Sukarela;
4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih melakukan *Go Private*, antara lain:<sup>9</sup>

1. Perusahaan merasa lebih mendapatkan keuntungan jika *Go Private*.
2. *Expenses* (biaya) menjadi perusahaan publik biayanya mahal karena antara lain adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kuartal dan tahunan.
3. Kondisi kinerja dan keuangan perusahaan yang kuat sehingga tidak perlu lagi memperoleh dana dari masyarakat.
4. Perusahaan tidak perlu lagi membagi hasil keuntungan dan beberapa persyaratan lain yang berhubungan dengan kepemilikan saham.
5. Perusahaan menganggap tidak ada prospek menarik bagi mereka untuk tetap terdaftar di Bursa, karena kinerja usaha terus memburuk.
6. Adanya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dilakukan pemegang saham mayoritas dengan investor baru, yang mensyaratkan perusahaan untuk *Go Private*.
7. *Competitive Intelligence*, di mana kewajiban *disclosure information* berpotensi menguntungkan para pesaingnya dan ini tidak terjadi di perusahaan tertutup.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, "Menjadi Publik (Go Public) dan Menjadi Tertutup (Go Private) Kembali", *Business News*, 27 Juli 2007 Nomor 7541, hlm. 12.

8. *Controlling function*, dengan *Go Private* dapat dihindari kemungkinan pihak luar (*outsider*) untuk membeli saham pengendali.

Selain alasan di atas, terdapat beberapa hipotesis yang menjelaskan penyebab dilakukannya *go private* oleh perusahaan publik, yaitu:

1. Hipotesis Penghematan Pajak,
2. Hipotesis Masalah Biaya Agen (pengelola perusahaan),
3. Hipotesis Biaya Transaksi
4. Hipotesis Perlindungan terhadap Usaha Pengambilalihan,
5. Hipotesis *Undervaluation*.

Adapun prosedur dalam melakukan *go private* akan diuraikan menjadi prosedur di dalam Bursa dan prosedur di luar Bursa.

1. Prosedur di dalam Bursa
  - a. Penyampaian rencana *delisting* saham kepada Bursa.
  - b. Berdasarkan permohonan *delisting* dari Perusahaan Tercatat, Bursa melakukan suspensi atau penghentian perdagangan sementara efek Perseroan. Hal ini dilakukan karena usulan *Go Private* dapat berpotensi mempengaruhi harga efek secara signifikan.
  - c. Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, *draft* surat edaran, serta ringkasan surat edaran kepada Bapepam. Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar nasional minimal mencantumkan 3 (tiga) hal di atas dan juga sekaligus dilakukan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS kepada Bursa.
  - d. Apabila RUPS menyetujui rencana *delisting*, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional mengenai tata cara pembelian kembali saham.
  - e. Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan *delisting* saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah:

- 1) Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa;
- 2) Perusahaan tercatat telah membayar biaya *delisting* saham sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir;
- 3) Bursa memberikan persetujuan *delisting* Saham dan mengumumkan di Bursa.

## 2. Prosedur di luar Bursa

Perseroan Terbatas (PT) yang akan melakukan *go private* harus melakukan RUPS. RUPS ini bertujuan untuk mendapat persetujuan melakukan *go private* dan mengubah anggaran dasar PT. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan RUPS dalam rangka *go private* adalah sebagai berikut.

- a. Dalam aksi *go private*, PT mengubah status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup dan mengubah permodalannya. Dengan demikian PT harus mengubah anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.<sup>10</sup> RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat diselenggarakan atau dilangsungkan dengan dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.<sup>11</sup>
- b. Selanjutnya Keputusan dalam RUPS untuk mengubah anggaran dasar PT adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.<sup>12</sup>
- c. Perubahan anggaran dasar PT dalam rangka *go private* harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f UUPT bahwa Perubahan anggaran dasar PT berupa perubahan status PT dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya, harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 19 ayat (1).

<sup>11</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab VI, Pasal 88 ayat (1).

<sup>12</sup> *Ibid.*



Hak Asasi Manusia.<sup>13</sup> Sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan anggaran dasar PT dalam rangka *go private*, maka perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku.<sup>14</sup> PT kembali menjadi PT tertutup.

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.<sup>15</sup> Pembinaan, pengaturan dan pengawasan oleh Bapepam tersebut bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi pemodal dan masyarakat.<sup>16</sup>

Saat ini, tugas pengaturan dan pengawasan pasar modal ini telah berpindah dari Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Peralihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Bapepam-LK kepada OJK dimulai sejak tanggal 31 Desember 2012.

OJK mengambil bagian dalam pengawasan terhadap proses pelaksanaan *go private*. OJK melalui Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pasar Modal melakukan pengawasan dalam proses *go private*, yaitu untuk mengawasi apakah pelaksanaan *go private* sudah sesuai dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sebagai salah satu prinsip penting dalam pasar modal, Prinsip Keterbukaan juga dilaksanakan dalam proses *go private*. Hal ini terlihat dalam proses di bawah ini.

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 21 ayat (1) dan (2).

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab II, Pasal 23.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab II, Pasal 3 ayat (1).

<sup>16</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab II, Pasal 4.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Perusahaan Tercatat yang akan melakukan *go private*, wajib menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:
  - a. alasan dan tujuan *delisting* sahamnya;
  - b. pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan tercatat;
  - c. perkiraan harga pembelian saham.<sup>17</sup>
3. Apabila RUPS dari perusahaan yang akan melakukan *go private* menyetujui rencana *delisting*, maka perusahaan tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional mengenai tata cara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi:<sup>18</sup>
  - a. harga pembelian saham;
  - b. nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, jika ada;
  - c. periode pembelian saham sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal iklan hasil RUPS;
  - d. penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.
4. Penawaran Tender yang dalam proses *delisting*, wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, salah satu di antaranya mempunyai peredaran nasional.

Pelaksanaan *go private* tentulah membawa akibat hukum, baik bagi *emiten* (perusahaan) maupun bagi investor. Adapun akibat hukum yang timbul akan diuraikan sebagai berikut.

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Ketentuan III.2.2.1..

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Ketentuan III.2.2.3..

## 1. Emiten

*Delisting* merupakan bagian dari proses *go private*. Dengan terjadinya *delisting*, akibat pertama adalah *emiten* tidak lagi dapat memperdagangkan sahamnya di bursa saham yang bersangkutan karena sahamnya telah dihapus dari daftar efek. Akibat yang kedua, dengan terjadinya *delisting* maka status perusahaan berubah dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Dengan berubahnya status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, maka lepaslah pemberlakuan kewajiban dan ketentuan yuridis bagi perusahaan terbuka. Selanjutnya dalam hal perizinan perusahaan, maka perusahaan wajib menyesuaikan perizinannya. Sebagai contoh adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

## 2. Investor

Investor yang bermain di pasar modal tentu sangat berharap dapat memperoleh *capital gain* yang tinggi dari saham yang dimilikinya sebagai bentuk penyertaan modal yang telah ditanamkan di perusahaan. Dengan adanya pelaksanaan *go private* oleh emiten, investor tentu tidak dapat lagi memiliki saham dari perusahaan yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan atas saham tersebut.<sup>19</sup>

Pelaksanaan *go private* juga harus memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Saham Minoritas. Hal ini terlihat dalam hal sebagai berikut:

1. Diperlukannya persetujuan pemegang saham independen.
2. Perlindungan yang dimaksud dalam rangka penawaran tender (*tender offer*) ini meliputi:<sup>20</sup>
  - a. Bahwa calon pembeli (*offeror*) adalah pihak yang bonafide, baik dari sisi keuangan maupun integritas yang dimilikinya;
  - b. Harga yang ditawarkan berlaku untuk semua pihak, yang perlu dicermati penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat;
  - c. Informasi tentang perusahaan sasaran (*target company*) harus mengandung kebenaran;

---

<sup>19</sup> Indah Wandita Putri dan Mohamad Heykal, "Kinerja Saham PT Aqua Golden Mississippi Tbk Setelah Pembatalan Go Private dan Estimasi Harga Saham Aqua Tahun 2010", *Binus Business Review* Vol. 1 No. 2, (Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2010), hlm. 537.

<sup>20</sup> I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), hlm. 440-441.

- d. Harga yang ditawarkan oleh pembeli harus lebih tinggi dari harga tertinggi yang diajukan oleh pihak yang sama atau harga pasar tertinggi di bursa efek dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman;
  - e. Proses *tender offer* harus transparan;
  - f. Untuk mencegah terjadinya *insider trading* sebagaimana dilarang dalam UUPM, pihak *offeror* dilarang melakukan transaksi dalam jangka waktu 10 hari sebelum pengumuman *tender offer* sampai dengan *tender offer* selesai.
3. Dalam hal penentuan harga maka harga penawaran pembelian dalam proses *tender offer* kecuali ditentukan lain oleh Bapepam-LK, harus lebih tinggi dari:<sup>21</sup>
- a. Harga penawaran tender yang diajukan sebelumnya oleh pihak yang sama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum pelaksanaan pengumuman penawaran tender.
  - b. Harga pasar tertinggi saham tersebut di bursa efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman penawaran tender.
- Bapepam-LK dapat menentukan harga lain selain yang telah disebut seperti dalam hal kasus *go private* yang dilakukan PT Aqua Golden Mississippi, Tbk.
4. Dalam hal pembelian kembali saham perseroan, perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik ini adalah adanya pemberian hak kepada setiap pemegang saham untuk:
- a. Mengajukan gugatan terhadap perseroan, apabila mereka merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan lampirannya Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Angka 11.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab III, Pasal 61 ayat (1).

- b. Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan.<sup>23</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris adalah salah satu profesi penunjang pasar modal. Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.

Untuk diangkat menjadi profesi penunjang pasar modal, notaris haruslah terdaftar di Bapepam. Tata cara pendaftaran menjadi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Notaris dapat diberhentikan sebagai profesi penunjang pasar modal apabila pendaftarannya sebagai profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Bapepam (OJK) dengan alasan izin profesi notaris dicabut oleh instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPM. Selain itu, notaris pasar modal juga dapat berhenti dengan sukarela dengan mengirimkan surat permohonan berhenti kepada Bapepam (OJK). Selain itu, notaris dapat berhenti menjadi profesi penunjang pasar modal dengan mengajukan surat permohonan berhenti menjadi profesi penunjang pasar modal.

Di pasar modal, notaris berperan dalam sebagai pejabat umum yang berwenang dalam perubahan anggaran dasar para pelaku di pasar modal dan perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan di pasar modal seperti perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham.

Dalam proses *go private*, notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa proses perubahan anggaran dasar perseroan telah memenuhi ketentuan yang ada, baik ketentuan yang berlaku di Bursa maupun ketentuan umum yang berlaku terhadap perseroan terbatas. Pelaksanaan RUPS sebagai proses pengambilan

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab III, Pasal 62 ayat (1).

keputusan tertinggi dalam perseroan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan RUPS ini harus diperhatikan mengenai kuorum pemanggilan dan kuorum pengambilan keputusan. Notaris harus memastikan dalam pelaksanaan RUPS, kepentingan setiap pihak terlindungi, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Dalam RUPS ini harus disetujui mengenai perubahan status perseroan dari PT yang terbuka menjadi PT yang tertutup dan mengenai perubahan anggaran dasar PT. Notaris wajib membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain RUPS, Notaris juga berkewajiban memantau pelaksanaan dan pembayaran penawaran tender PT guna pembelian kembali saham PT dari masyarakat umum. Sehingga perubahan anggaran dasar PT sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.
2. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal bila terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran.

Sehubungan dengan peran dan tanggung jawab notaris yang berkegiatan di pasar modal, tidak ditemukan suatu aturan pun yang mengatur bahwa notaris diwajibkan melaporkan akta/surat/dokumen yang dibuat berkenaan dengan transaksi di bidang pasar modal kepada Bapepam-LK (OJK) sebagai lembaga pengawas kegiatan di pasar modal. Kewajiban pelaporan oleh notaris yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal hanyalah kewajiban pelaporan terhadap setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari notaris. Perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan.<sup>24</sup> Informasi yang diperoleh dari Ibu Untari, Bagian Profesi Hukum Pasar Modal (Notaris) Bapepam-LK, yang

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dengan Lampiran Peraturan VIII.D.1, Angka 7.

dimaksud dengan data dan informasi dari notaris antara lain adalah informasi berupa perpindahan alamat kantor notaris, izin cuti notaris serta penggunaan notaris pengganti.<sup>25</sup>

Pengawasan terhadap notaris pasar modal saat ini dilakukan oleh Direktorat Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal dalam kelembagaan OJK. Sebelumnya, pengawasan terhadap notaris pasar modal ini dilakukan oleh Biro Perundang-undangan dan Bantuan hukum Bagian Profesi Hukum Subbagian Notaris pada Bapepam-LK.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan *go private*, pengawasan yang dilakukan terhadap notaris pasar modal adalah berupa apakah notaris tersebut merupakan notaris yang telah terdaftar di pasar modal. Jika bukan notaris pasar modal, maka notaris tidak berwenang untuk membuatkan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup.

Sebagai sebuah profesi, notaris dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris. Menurut Munir Fuady kedudukan Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu Kode Etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik profesi yang baik dan modern.<sup>27</sup>

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban notaris dilakukan secara perdata, pidana dan administrasi. Secara perdata, notaris

---

<sup>25</sup> Atas Rihajeng, "Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", (Tesis, Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2013), hlm. 54.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Pasal 1394.

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

dapat dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian karena turunnya kekuatan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Selain sanksi perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi perdata dan sanksi administrasi, seorang notaris pasar modal juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dijatuhkan terhadap notaris dalam hal notaris melakukan tindak pidana. Jika dalam pembuatan akta notaris, notaris terbukti melakukan tindak pidana, maka notaris dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan Hakim.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap profesi notaris adalah sebagai berikut.

#### 1. Hak Ingkar atau Kewajiban Ingkar Notaris

Undang-undang meletakkan secara umum kepada setiap orang yang cakap menjadi saksi, berkewajiban untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana, akan tetapi kewajiban itu tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan bicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: (3) segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”, Pasal 148 KUHP, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR (*Het Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 170 KUHAP dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila mereka mempergunakan hak ingkarnya, hak ingkar ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut di atas, yakni bahwa setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana atau hak ingkar



adalah hak tolak atau hak minta dibebaskan untuk dapat menjadi saksi di muka pengadilan.<sup>28</sup>

## 2. Majelis Kehormatan Notaris

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2013 atas perkara Nomor 49/PUU-X/2012, mengakibatkan tidaklah lagi diperlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Hal ini membawa dampak yang cukup keras terhadap profesi notaris. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dibentuklah lembaga baru yang disebut Majelis Kehormatan Notaris sebagai pihak yang berwenang memberikan persetujuan terhadap pemanggilan terhadap notaris dan pengambilan minuta akta dan dokumen yang pelengkapannya oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses pengadilan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam proses *go private*, notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rencana pelaksanaan *go private*. Dalam pembuatan akta tersebut notaris pasar modal harus memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal. Jika dalam hal pembuatan akta Berita Acara Rapat tersebut, notaris sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka notaris berhak mendapat perlindungan hukum.

Dalam Akta Berita Acara Rapat tersebut, notaris menuangkan apa yang dilihat dan didengar selama Acara Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung ke dalam akta sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Jika pihak yang berwenang (penyidik ataupun hakim) yang akan memanggil notaris terkait akta dalam proses *go private* tersebut, maka pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

---

<sup>28</sup> A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 142.

#### IV. Kesimpulan Dan Saran

##### A. Kesimpulan

1. *Go private* merupakan aksi korporasi mengubah status perusahaan dari PT Tbk menjadi PT tertutup. Pengaturan *go private* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus seperti halnya di Amerika Serikat dengan Peraturan SEC Nomor 13e-3. Ketentuan mengenai *go private* dan pelaksanaannya didasarkan kepada beberapa peraturan dan hanya secara sepotong-sepotong diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.
2. Notaris merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal. Notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal, haruslah memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang pasar modal serta mendaftarkan diri kepada OJK. Di pasar modal, notaris berperan sebagai pejabat pembuat akta anggaran dasar dari pihak yang terlibat di pasar modal dan sebagai pembuat perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal. Dalam proses *go private*, notaris berperan sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar perseroan.
3. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Dalam hal terjadi kesalahan ataupun kelalaian dalam pembuatan aktanya terkait *go private*, notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana maupun administrasi. Dalam hal notaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *go private*, maka notaris berhak mendapat perlindungan, baik secara preventif maupun secara represif.

##### B. Saran

1. Sehubungan hingga saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai *go private* di Indonesia, maka disarankan agar pemerintah mulai menyusun dan segera mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *go private*.
2. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan penunjang kegiatan dalam pasar modal. Oleh karenanya, disarankan kepada pemerintah agar dapat

menyusun dan mengeluarkan peraturan yang lebih detail mengenai peranan notaris pasar modal. Selain itu, disarankan kepada OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal untuk lebih memperhatikan setiap bagian dari pasar modal, terkhusus notaris. Ketentuan dan aturan baru di pasar modalnya harus segera disosialisasikan kepada setiap bagian pasar modal sehingga kegiatan di pasar modal dapat berjalan dengan lancar.

## **V. Daftar Pustaka**

### **A. Buku, Jurnal, Majalah dan Makalah**

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat. 2006.

Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.

Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni. 1983.

Nasarudin, M. Irsan, *et.al.* *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.

Putri, Indah Wandita dan Mohamad Heykal. "Kinerja Saham PT Aqua Golden Mississippi Tbk Setelah Pembatalan Go Private dan Estimasi Harga Saham Aqua Tahun 2010". *Binus Business Review* Vol. 1 No. 2, (2010).

Rihajeng, Atas. "Pengawasan Terhadap Notaris yang Berkegiatan di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan". Tesis. Ilmu Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2013.

Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan SAD Satria Bhakti. 2000.

Widiatno, Men Wih, Purnomo Santoso dan Ardi Jaya Pradipta. "Go Private". Makalah. Jakarta: Universitas Indonesia.

Widjaja, Gunawan. "Menjadi Publik (Go Public) dan Menjadi Tertutup (Go Private) Kembali", *Business News*. 27 Juli 2007.

### **B. Website**

Riyanto, Agus. "Go Private di Pasar Modal Indonesia", <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/01/go-private-di-pasar-modal-indonesia/> diakses 14 April 2016.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dengan Lampiran Peraturan VIII.D.1.

Republik Indonesia, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan lampirannya Peraturan Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu